

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Adjie, Habib. 2011. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Andi Prajitno. 2015. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia sesuai UJNNomor 2 Tahun 2014*. Surabaya: Perwira MediaNusantara.
- Agus Pandoman. 2017. *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*. Yogyakarta: Raga Utama Kreasi.
- Budi Untung. 2015. *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan Ppat) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta : Cv. Andi Offset.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Lutfhan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim HS. 2015. *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suardeyasasri. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: ReifikaAditama.
- Thong Kie, Tan. 2011. *Studi Notariat Serba – Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : PTIchtar Baru Van Hoeve.

Tutut Ferdiana Mahita Paksi da Rian Achmad Perdana (editor). 2016. *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosiolegal*. Yogyakarta: Thafamedia.

Wiratni Ahmadi, Sari Wahyuni, Ahmad S. Djoyosugito. 2016. *Tehnik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Logoz Publishing.

### **Jurnal**

Estikharisma Harnum, Akhmad Khisni, “*Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti*”, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, Desember 2017.

Kiki Joesyiana. “*Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda)*”. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR* Vol 6 No 2 Tahun 2018.

Kunni Afifah. “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*”. *Lex Renaissance*. No. 1 Vol. 2 Januari 2017.

Melita Trisnawati, Suteki. “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal*”. *NOTARIUS*, Volume 12 Nomor1 (2019) ISSN: 2086-1702

M. Muslih. 2013. “*Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*”. *Legalitas* Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1.

Ovina Viviani Bambang Siswanto. “*Kekuatan Hukum Akta Otentik yang Distempel Tanda Tangan*”. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. Vol .18.No. 3 Januari 2021.

Rahmad Hendra. “*Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 1

Yofi Permana. R. “*Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat*”. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 5, No 1, September 2019.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 75)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tentang Burgerlijk  
Wetboek Voor Indonesie (BW)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (Himpunan  
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara  
Pangkat, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan  
Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Nomor 990  
Tahun 2019).

Peraturan Pedoman Kerja Notaris 2008 tentang Bentuk dan Ukuran  
Cap/Stempel Notaris, Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan  
Notaris, Syarat dan Tata Cara Pangkat, Perpindahan dan  
Pemberhentian Notaris.

Kode Etik Notaris yang ditetapkan pada kongres (Rapat Anggota)  
Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung tanggal 28 Januari  
2005, sebagaimana telah diubah pada Kongres Luar Biasa Ikatan  
Notaris Indonesia (INI) di Banten tanggal 29-30 Mei 2015.

### **Web**

Lupita Maxellia, "Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan  
Akta Notaris dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun  
2004 tentang Jabatan Notaris", melalui <https://media.neliti.com>,  
diakses tanggal 23 Desember 2021.